

POLITIK IDENTITAS DIBALIK PANGGUNG PILKADES

Dian Ariyani Surya, Ali Noerzaman, Usni

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jl.K.H Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec.Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. 15419

Email: dianariyanisurya21@gmail.com

Abstrak

Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan tingkat bawah yang menyentuh masyarakat sebagai implementasi sistem demokrasi. Sehingga warga negara mempunyai hak yang bebas untuk mengemukakan pendapatnya serta bebas untuk memilih. tetapi tidak lepas dengan kaidah undang-undang yang sudah ada. Cara memilih seorang kepala desa dapat dilakukan di desa tersebut secara langsung, damai, dengan warga desa yang sudah siap untuk memilih calon kepala desanya. Namun, pada saat pemilihan kepala desa sedang berlangsung kerap kali dibarengi dengan politik identitas di dalamnya. Hal tersebut dilakukan supaya calon kepala desa bisa mencapai tujuannya untuk memperoleh suara terbanyak di pemilihan calon kepala desa. Seperti yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa rumpin pada tahun 2019. Tidak hanya politik identitas saja yang ada di balik panggung pemilihan kepala desa, tetapi politik identitas etnikpun dihadirkan dalam panggung pemilihan kepala desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai metode deskriptif. Teknik pengumpulan data sendiri menggunakan teknik wawancara yang mendalam kepada berbagai sumber. Penelitian ini juga menggunakan data yang sekunder dengan melalui studi literatur dari sebuah jurnal serta media online yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa politik identitas warga yang ada di desa rumpin di landasi dengan adanya sebuah agama dan etnik dalam budaya politik yang warga desanya memiliki sebuah kepercayaan kepada calon kepala desanya sehingga bisa terjadi sebuah nepotisme di desa Rumpin.

Kata kunci : Pemilihan Kepala Desa, Politik Identitas, Demokrasi, Politik Identitas Etnik

Abstract

The village head election is a lower-level election that touches the community as an implementation of a democrartics system. So that citizenz have the rifht to be free to express their opinions and are free to choose. But not separated from existing laws. How to choose a village head can be done ini the village directly, peacefully, with villagers who are ready to elect their candidate for village head. However, when the village head election is taking place, it is often accompanied by identity politics in it.this is done so that village head candidates can achieve their goal of obtaining the most votes in the election of village head candidates. As happened during the rumpin village head election in 2019. Not only identity politics is behind the village head election stage, but ethnic identity politics is also presented in the village head election stage. This study uses qualitative approach by using a descriptive method. The data collection technique itself uses in-depth interview tecjniques to various sources. This study also uses secondary data through literature studies from a journal and online media which are used as reference materials. The results of this study found that the identity politics of residents in the village of rumpin is based on the existence of religion and ethnicity in the political culture where the villagers have a belief in the candidate for the village so that nepotism can occur in the village rumpin.

Keywords : Village head election, identity politics, Democracy, Ethnic Identity Politics.

PENDAHULUAN

Pilkades atau pemilihan kepala desa merupakan pemilihan untuk negara yang menganut sistem demokrasi yang bisa membebaskan seorang warga negaranya untuk memiliki hak yang bebas, bebas berpendapat, bebas memilih, tidak lepas dari kaidah undang-undang yang sudah tertera, serta cara untuk pemilihannya pun dapat dilaksanakan secara langsung di desa tersebut dengan warga desa yang siap untuk memilih pemimpin desanya tersebut. Namun, pada saat pemilihan kepala desa sedang berlangsung kerap kali dibumbui dengan adanya politik identitas didalamnya agar bisa mencapai tujuannya yang pragmatis seperti pada pemilihan kepala desa rumpin pada tahun 2019 lalu. Bisa juga dengan hadirnya sebuah politik identitas etnik yang dimainkan perannya agar bisa meraup suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa tersebut. Namun, pada saat Pemilihan kepala desa akan berlangsung kerap kali dibumbui dengan adanya politik identitas didalamnya untuk mencapai tujuan yang pragmatis seperti pada Pemilihan kepala desa rumpin pada tahun 2019. Kontestasi Pilkades rumpin 2019 diikuti oleh 3 calon terdiri dari Robi Setiawan, SE. Erna Suminar, S.Sos. dan Usup Supriadi. Pilkades 2019 ini akan memungut suara pada tanggal 03 November 2019. Untuk sebuah proses politik seperti itu bisa menyebabkan kelompok-kelompok identitas bisa untuk saling berhadapan, tidak ada yang dominan diantaranya sehingga, terlihat samar atau tidak jelas siapa yang akan menjadi seorang pemenang yang akan memaikan perannya di panggung desa itu. Pemilihan umum atau pemilihan kepala desa sendiri termasuk kedalam sebuah proses politik dimana berbagai faktor-faktor identitas bisa menjadi bahan pertarungan. Kini kita bisa lihat bagaimana sang aktor yang sedang mengelola isu etnis dan agama bisa menjadi hal yang masuk kedalam sebuah pertarungan.

Memang tidak akan berjalan dengan mulus. Dalam zaman sekarang banyak persoalan yang kita hadapi dari mulai pertama, sebuah pesta demokrasi seperti pemilihan kepala negara, kepala daerah, atau bahkan kepala desa sekalipun bisa ikut untuk mendorong sebuah politik identitas. Politik identitas yang sangat mengedepankan suku, ras, agama, serta identitas kedaerahan untuk yang dapat meraup suara terbanyak dibandingkan dengan program kerja yang ditawarkan pada saat pemilihan kepala desa itu untuk kepentingan masyarakat yang

berorientasi kerja politik. Kemudian, akibat dari adanya politik identitas yang dimainkan akan mengakibatkan sebuah masyarakat akan terpecah belah tidak ada lagi kerukunan, karena mereka tidak lagi peduli bagaimana mengembalikan sebuah persatuan sebagai bangsa yang walaupun berbeda-beda tetapi tujuan mereka sama. Mungkin saja memang mereka akan mudah sekali tersinggung, gampang terprovokasi, dan emosi yang terbakar. Jika, terjadi sebuah perselisihan apalagi sampai menjatuhkan sebuah perkara maha yang berhak untuk menjadi penengahnya adalah seorang pendidik, mubaligh, ustadz, guru, kiai, serta tokoh agama mereka semua berhak dan dituntut agar bisa bertanggung jawab untuk meredakan serta mengatasi kesalahpahaman itu.

Pembumian nilai Pancasila memang harus menjadi proyek kebangsaan kita hari ini. Oleh karena sebuah sirkulasi politik yang tengah dilanda badai meruncingnya wacana identitas primordialistik. Landasan ini jelas berbeda dengan identitas keindonesiaan kita sewaktu sama-sama melawan penjajahan, kali ini politik identitas tengah menyisir sentimen suku agama, dan ras tertentu. Fenomena yang lagi populer ini terinfiltrasi pada arus pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Euphoria pun seakan menjadikan tolak ukur keberhasilan demokrasi di negeri ini. Dalam hal partisipasi, memang model pemilihan seperti sekarang ini menjadi sarana yang paling efektif untuk menyalurkan aspirasi rakyat untuk memilih pemimpinnya. Tetapi, konstruksi ini selalu menjadi masalah ketika pesta demokrasi tersebut bersentuhan dengan konflik-konflik horizontal yang malah membuat instabilitas daerah. Politik identitas yang sering kali muncul ditengah-tengah pemilihan kepala desa yang akan menyebabkan perpecahan ataupun perbedaan pendapat tentang siapa yang akan dipilih. Banyak sekali warga yang memilih calon pemimpinnya karena mereka tahu si pemimpin ini lahir dari keluarga siapa, agamanya apa, bahkan yang sering terpilih menjadi pemimpin desa itu yang sering datang untuk blusukan, bahkan yang paling parah adalah siapa yang mampu memberikan uang atau biasa disebut oleh warga desa serangan fajar yang lebih besar maka si calon akan maju serta terpilih menjadi pemimpin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif menurut (Kaelan, 2010) Penelitian yang menekankan kepada segi kualitas yang alamiah terhadap konsep, nilai, bahkan ciri yang melekat kepada objek penelitian tersebut. Pada jurnal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena beberapa hal, hal pertama yaitu pertimbangan yang teoritis. Penulis menggunakan sebuah teori prilaku sosial yang hanya fokus kepada kajiannya saja untuk melihat prilaku politik seorang warga desa rumpin pada pemilihan kepala desa tahun 2019. Hal yang kedua, Pertimbangan yang praktis. Dimana penelitian kualitatif ini secara umum bergantung kepada sebuah pengamatan seorang manusia dalam lingkungannya dan yang berhubungan dengan orang itu baik hubungan dari segi bahasanya maupun dari segi peristilahannya. Dari sisi operasionalnya pendekatan kualitatif juga bisa memudahkan peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya. Dalam proses penelitian ini peneliti terjun langsung dan bertemu langsung dengan warga desa rumpin. Hal yang ketiga adalah proses itu bisa untuk menekankan sebuah pertanyaan dari penelitian yang sedang dilakukan. Maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan tersebut dirasa cocok untuk menjadi fokus penelitian tersebut karena peneliti bukan untuk menguji hipotesis untuk mendapatkan sebuah relevansi karena sebuah perbedaan ataupun hubungan yang variabel. Pendekatan Kualitatif sendiri diperuntukan sebagai sebuah pendekatan yang bisa untuk menjawab sebuah pertanyaan, menemukan arti dari sebuah fenomena, menggruntutkan data-data, dan mengejar sebuah arti sampai kepada akar masalah di dalam fokus penelitian tersebut. Untuk metodenya sendiri peneliti menggunakan metode deskriptif, metode ini diambil agar peneliti bisa menemukan data-data yang fakta pada saat peneliti terjun langsung kelapangan, dapat disuguhkan secara secara terarah agar dapat untuk dipahami dan disimpulkan. Metode deskriptif merupakan bagian dari karakter pendekatan kualitatif yang dibutuhkan untuk penulisan laporan penelitian dan deskripsi arti dalam sebuah kata. Metode deskriptif juga memiliki hubungan dengan kasus yang sedang diteliti tentang perilaku masyarakat desa pada saat pemilihan kepala desa akan berlangsung dan bisa untuk dijadikan sebuah gambaran sifat dari masyarakat desa

secara deskriptif, terarah, dengan mengungkapkan sebuah fakta yang kongkrit perihal latar belakang yang bisa mempengaruhi adanya sebuah politik identitas masyarakat pada pemilihan kepala desa pada tahun 2019 silam. Sesuai dengan diambilnya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperoleh data kualitatif baik diperoleh dari kata-katanya maupun dari bentuk lainnya. Teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan data observasi (sebuah pengamatan pada saat meneliti), wawancara yang mendalam kepada masyarakat desa tersebut (Depth Interview), serta peneliti menggunakan data yang sekunder melalui sebuah studi literatur baik dari buku, media online maupun sebuah jurnal agar menjadi sebuah rujukan yang relevan dalam penelitian tersebut. Demikianlah Maka dari itu di dalam penelitian kualitatif ini termasuk penelitian sebuah agama yang proses analisisnya berjalan secara dinamis selama waktu penelitian berlangsung (Kaelan, 2010). Penelitian ini berlokasi di Desa Rumpin, dengan mengambil data dari berbagai sumber baik keustakaan, media massa dan jurnal serta dari sejumlah narasumber.

POLITIK IDENTITAS

Politik identitas bisa diartikan secara sederhana sebagai sebuah strategi politik yang berfokus kepada sebuah pembedaan yang memanfaatkan sebuah ikatan primordial. Politik identitas juga bisa dikatakan sebagai alat untuk berpolitik di dalam kelompok baik etnis, agama, suku, atau bahkan yang lain yang memiliki sebuah tujuan tertentu, dan bisa untuk alat yang sebagai penunjuk sebuah jati diri dari kelompok tersebut. Maka dari itu politik identitas sering di gunakan di dalam hal apapun termasuk kepada pemilihan kepala desa yang ada desa rumpin, banyak calon-calon kepala desa yang bermain politik identitas sebagai penunjuk jati diri para kontestan agar bisa lebih di kenal lalu bisa meraup suara terbanyak pada saat pemilihan suara berlangsung. Politik identitas bisa di nilai sebagai politik yang lebig jahat di bandingkan politik uang yang sering juga ditemukan dalam pemilihan-pemilihan lainnya. Didalam diri seseorang terdapat institusi yang baik yang terdapat 3 ada Etnisitas, Agama, dan Nasionalitas. Ketiga hal itulah yang bisa menjadi dominan bisa untuk mewarnai kehidupan sehari-hari. Seorang warga bisa

menunjuk ke individu namun dilain pihak masyarakat lebih ditekankan kepada yang tidak memiliki peran sebagai sebuah badan publik ataupun pelaku. Sebuah proses demokrasi di Indonesia adalah sebuah proses yang tidak bisa terlepas dari sebuah identitas agama maupun identitas etnis. Hal itu bisa kita lihat kepada keikutsertaan sebuah partai politik yang hendak mengikuti pilkada sebelumnya. Proses demokrasi khususnya didalam pilkada saja sering terjadi tidak terlepas dari sebuah peran dan banyak partai yang memiliki macam ideologi yang ikut menggonggong. Bermacam-macam ide identitas agama dan etnis sering di jadikan bahan sebagai alat politik seseorang. Kita bisa ketahui bahwa secara teori politik identitas adalah politis yang untuk menomer satukan kepentingan anggota-anggotanya di dalam suatu kelompok karena memiliki persamaan identitas atau bahkan kesamaan sifat baik yang basicnya kepada etnisitas, ras, gender, atau keagamaan. Politik identitas adalah sebuah perbedaan sebuah rumusan dan politik identitas juga merupakan sebuah tindakan politis dengan sebuah upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi sebuah kebijakan, sebuah penguasaan kepada distribusi nilai yang bisa dilihat berharga bahkan sampai tuntutan yang paling fundamental seperti, penentuan sebuah nasib seseorang atas sebuah dasar keprimordialan. Politik identitas terlihat bisa dari kesadaran seseorang agar bisa mengelaborasi identitas partikular dalam sebuah bentuk hubungan didalam identitas yang primordial etnik dan agama. Tetapi, didalam jalan selanjutnya politik identitas bisa menjadi plagiat dan diambil oleh seorang kelompok yang mayoritasnya agar memapankan dominasi sebuah kekuasaan. Penggunaan politik identitas agar bisa meraih sebuah kekuasaan justru bisa semakin membuat perbedaan dan mendorong pertengkaran tetapi tidak berarti menuai sebuah kritikan yang tajam. Politik identitas seakan-akan membuat kuat sebuah keutuhan yang sifatnya itu esensialistik akan hal keberadaan sebuah kelompok sosial tertentu yang berdasarkan identifikasi primordialitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran politik identitas etnis Dalam pemilihan kepala desa rumpin

Dari hasil pengamatan langsung dilapangan peneliti dan hasil wawancara beberapa warga

desa rumpin. Dari data lapangan dihasilkan sebuah informasi bahwa politik identitas etnis di rumpin bisa memiliki sebuah pengaruh yang cukup besar kepada ranah politik terkhusus untuk memperebutkan suara didalam pemilihan kepala desa di rumpin. Penulis bisa mengidentifikasi sebuah tindakan atau bahkan siasat yang dimiliki oleh masing-masing calon kepala desa bersama tim suksesnya diantaranya ada siasat dilakukannya manipulasi dan mobilisasi, dominasi sosial, dan solidaritas politik.

A. Siasat Manipulasi dan Siasat Mobilisasi

Sebuah peran politik identitas etnis di dalam panggung pemilihan kepala desa menerapkan sistem yang terstruktur dan terorganisir dengan melakukan siasat membawa individu atau bahkan komunitas berdasarkan persamaan etnis agar bisa menguatkan pemilihan suara terbanyak. Kenyataan politik identitas itu sudah menjadi keturunan atau sesuatu yang given. Seorang warga dalam memilih pemimpin pada akhirnya kecanduan orientasi etnis. Kepada warga yang multi etnis seperti di desa rumpin bisa sangat mungkin dengan melihat kenyataan politisasi etnis bisa dilakukan oleh masyarakat yang berkepentingan. Jika, kita lihat sebuah strategi elit-elit politik di desa rumpin sangat terorganisir sebuah pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara intens. Dari pendekatan instrumental tersebut bisa dikatakan bahwa makna politik etnis dalam penelitian ini adalah upaya melakukan politisasi etnis dalam rangka untuk mengejar kepentingan politik. Namun, ketika identitas itu berpindah kepada kepentingan yang berubah bisa dikatakan bahwa identitas menjadi sesuatu yang bersifat politisi. Disaat adanya politisasi identitas, identitas itu bisa bergerak kepentingan, identitas yang kepada mulanya adalah base on identity dan base on interest bisa dijadikan instrumen untuk bisa mendapatkan simpati dari para warga. Jadi, bisa dikatakan terjadinya sebuah politik identitas disebabkan adanya sebuah kelompok yang memiliki berbagai kepentingan. Ralitas politik identitas tersebut bisa dilihat bahwa etnis khususnya di desa rumpin dipolitisasi atau dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengejar keuntungan ekonomi dan politik. Dalam hal ini etnisitas tidak lagi dikatakan sebagai sebuah kelompok etnis yang berjuang melakukan upaya afirmasi. Tetapi, lebih dari pada itu identitas etnis bisa dipakai sebagai

instrumen agar bisa mengejar suatu kepentingan diarahkan perpolitikan. Tentu hal itu sangat menarik untuk kita lihat karena memperlihatkan suatu paradoks demokrasi dimana pada satu sisi kebebasan dan berbagai macam kelompok bisa dijamin taoui disisi lain terdapat kebebasan dan keberagaman tersebut bisa digunakan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu.

B.Siasat Dominasi Sosial

Sebagai manusia makhluk multidimensi memiliki sebuah perbedaan berdasarkan kepada beberapa faktor yang terdiri atas ciri fisiologis,kebudayaan,ekonomi,dan prilaku. Karena sebuah perbedaan inilah manusia bisa masuk ke dalam sebuah kelompok sosial tertentu sehingga bisa menciptakan masyarakat multikultural. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di Desa rumpin termasuk multi etnis dimana setiap individu bisa memperlihatkan dirinya di dalam masyarakat berdasarkan etnisitas. Jumlah penduduk etnis yang terlihat dimanfaatkan sebagai basic sehingga masyarakat preferensi memilih berdasarkan etnisitas. Siasat yang digunakan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Terbukti sejak periode pertama pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa rumpin hingga periode sekarang etnis bisa keterpilihannya menjadi kepala desa lebih sering jika dibandingkan dengan etnis yang lain (Hasil Penelusuran Penulis Di Lapangan).

C.Siasat Solidaritas Politik

Solidaritas politik bisa dikatakan sebagai sebuah gejala post modern. Gejala ini bisa dilihat melalui dengan adanya akomodir sebuah kekuatan sosial didalam politik tersebut. Melihat politik sebagai tujuan bahkan sebagai alat maka politik seharusnya menyertakan berbagai aspek didalamnya. Berbagai aspek itu harus bisa diikutsertakan untuk elit politik agar mendapatkan sebuah kekuasaan di dalam liberalisasi politik. Etnis masuk di dalam politik di desa rumpin suatu gambaran bahwa etnisitas merupakan sebagai tujuan dan alat untuk bisa memperebutkan kekuasaan atau bahkan mendapatkan suara terbanyak dalam perpolitikan. Gerakan sosial dianggap bisa mencapai tujuannya. Maka dari itu warga yang ada di desa rumpin sebagai konstituen yang di buat dan dilakukan secara logika sosialis.

Sebuah politik di tunjukan agar tujuan kelompok bukan sebagai tujuan bersama.

2. Dampak dari Politik Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Rumpin

Peneliti mendapatkan informasi pada saat peneliti melakukan wawancara dan observasi yang dilakukan maka didapatkan sebuah peran politik identitas etnis terkhusus di dalam phinisi integration review. Yang masing-masing bisa memiliki dampak positif maupun negatif.

A.Dampak Positif

Dari sebuah prilaku politik lokal yang terdapat di Desa Rumpin lebih ke arah yang dinamis. Para calon kepala desa disibukan dengan bagaimana mereka bisa menerapkan berbagai cara agar bisa mempengaruhi warga desa itu agar memilih kepala desa.

B.Dampak Negatif Politik Identitas

Yang bisa ikut serta dalam tahun pemilihan kepala desa di desa rumpin adalah kejadian yang sudah lama terbangun. Bisa untuk menciptakan sesuatu yang realitas sosoal bisa membelah dan bisa membagi masyarakat berdasarkan kriteria. Hal itu sangat fragmatif karena dinamika politik bisa berjalan ke arah yang bisa menimbulkan perpecahan sosial. Solidaritas politik bersifat politis karena kepentingan kekuasaan. Kesadaran persamaan dan perbedaan di dalam masyarakat yang diawali dari berbagai faktir politis wujudkan sikap etnosentrisme pada masing-masing etnis. Khususnya di dalam tahun politik tersebut masing-masing kelompok etnis berdiri atas dasar kepentingan sebuah kelompok. Hal itu bisa kemudian memicu konflik karena sikap yang etnosentrisme yang ditunjukan dengan mengecilkan satu sama lainnya. Konflik yang terjadi itu tergolong konflik yang kecil dan tidak menimbulkan korban maka penyelesaian konflik tersebut adalah tergantung kepada kesadaran antar etnis yang berkonflik.

KESIMPULAN

Pilkades secara langsung adalah kemajuan bangsa ini dalam berdemokrasi, selama 32 tahun suara rakyat dibelenggu dengan otoritarianisme dalam kekuasaan, tetapi ada pula tantangan kedepan bukan makin sedikit tetapi justru semakin banyak. Oleh karena itu politik identitas menjadi salah satu batu terjal terselenggaranya sebuah sistem pemilihan pemimpin yang ada di Indoensia. Ketika kita

melihat lebih jauh lagi hal tersebut haruslah dikontrol dan di formulasikan secara baik dalam hal pengaturan sistem partai politik yang kini merosot tajam dalam hal kepercayaan public.

Adanya politik identitas dibalik pemilihan kepala desa tentu membuat kita khawatir adanya sebuah nepotisme dimana ras, agama, dan etnis menjadi tolak ukur seseorang tersebut bisa melaju sebagai pemimpin disebuah desa. . Politik identitas yang sering kali muncul ditengah-tengah pemilihan kepala desa yang akan menyebabkan perpecahan ataupun perbedaan pendapat tentang siapa yang akan dipilih. Banyak sekali warga yang memilih calon pemimpinnya karena mereka tahu si pemimpin ini lahir dari keluarga siapa, agamanya apa, bahkan yang sering terpilih menjadi pemimpin desa itu yang sering datang untuk blusukan, bahkan yang paling parah adalah siapa yang mampu memberikan uang atau biasa disebut oleh warga desa serangan fajar yang lebih besar maka si calon akan maju serta terpilih menjadi pemimpin. Seharusnya ketika kita akan memilih seorang pemimpin baik untuk negara, daerah, ataupun desa kita harus bisa melihat bagaimana ia nanti akan berkerja dan memimpin desa secara baik. Membuat desanya menjadi tentram serta memperhatikan masyarakat desa yang tidak mampu. Adanya sebuah politik identitas sebenarnya bisa berdampak baik dan bisa untuk dimainkan demi terciptanya sebuah kualitas bagi semua masyarakat agar setiap perorangan bisa mendapatkan kesempatan yang sama baik dari segi pendidikan, ekonomi, politik, atau bahkan dari segi pemerintahan. Dikarenakan pada keyantaannya masih banyak sekali yang terjadi diantara mayoritas dan minoritas yang kerap terjadi adanya sebuah diskriminasi yang identitas menjadi sebuah aktor utama untuk mengurangi peluang. Tidak hanya politik identitas saja yang ada dibalik panggung sebuah pemilihan tetapi Politik uangpun ikut bermain didalam sebuah pilkades maka bisa dipastikan siapa yang akan meraih suara terbanyak karena keterbasan ekonomi masyarakat desa sehingga mengkesampingkan bagaimana si pemimpin itu kelak akan memimpin desanya tersebut.

REFERENSI

Jurnal

Nasrudin, Juhana 2018. "Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada

- Pilkada Dki Periode 2018-2022". Jurnal Studi Agama-Agama. Halaman 36-37
- Mahpudin 2019 "Demokrasi Dan Kabangkitan Politik Identitas: Refleski Perjalanan Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru". Jurnal Volume 1 Issue 1.
- Mubarok, Husni 2018. "Demokrasi, Politik Identitas, Dan Kohesi Sosial: Peluang Dan Tantangan Strategi Dakwah Untuk Menghalau Provokasi Politik Di Indonesia". Jurnal Bimas Islam Vol.11. No.Ii. (Pusad) Paramadina, Jakarta. Hal.3).
- Hemay, Idris Dan Munandar, Aris 2016. "Politik Identitas Dan Pencitraan Kandidat Gubernur Terhadap Perilaku Pemilih". Jurnal Politik 1737 Vol. 12 No. 01. Halaman 3.
- Prasetya, Arus Reka 2019. "Pengaruh Politik Identitas Melalui Media Sosial Terhadap Generasi Milenial Dan Pelaksanaan Pemilu". Resolusi Vol. 2 No. 2. Halaman 12.
- Nawir, Muhammad Dan Mukramin, Sam'un 2019. "Identitas Etnis Dalam Ranah Politik (Studi Kasus Pilkades Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat)". Phinisi Integration Review Vol. 2, No.2. Halaman 4-6.
- Santoso, Eka Putra B 2019. "Pemilu Dan Pilkada Dalam Pusaran Politik Identitas". Resolusi Vol. 2 No. 2.
- Sari, Endang 2016. "Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta". Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 2 No. 2.
- Lestari, Dina 2019. "Pilkada Dki Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia". Simulacra, Volume 2, Nomor 1.
- Fautanu, Idzam, M2 Buhori, Dan Gunawan, Heri. "Politik Identitas Dalam Pilkada Dki Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid". Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol.2 No.2.

Website

<https://kanalbali.id/politik-identitas-pemecah-atau-perekat-demokrasi/>
<http://indikator.co.id/uploads/20131212175900.I>

[NDIKATOR Perilaku Pemilih terhadap Politik Uang.pdf](#)